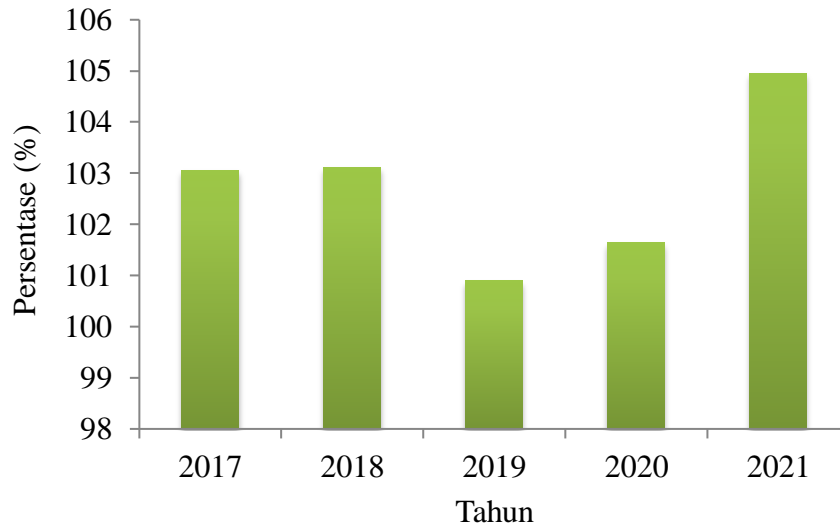


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Tahun 2021 tercatat sebanyak 88,43% masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian (BPS, 2021). Sayangnya, meskipun jumlahnya banyak, petani di Indonesia dari dulu sampai sekarang masih belum sepenuhnya sejahtera (Setiawan *et al.*, 2019). Hal tersebut disebabkan oleh kebanyakan petani sudah berusia lanjut dan berpendidikan rendah sehingga kemampuannya dalam bekerja semakin berkurang. Menurut hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa 45% petani berusia 45-54 tahun, 38% petani berusia 35-44 tahun, 16% petani berusia 25-34 tahun, dan 1% petani berusia < 25 tahun. Rata-rata petani hanya berpendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 73,97% yang berakibat pada kemampuan dalam menerapkan teknologi baru tidak maksimal (Arviani *et al.*, 2019). Kurangnya kualitas petani yang baik di Indonesia mengakibatkan minimnya pendapatan yang diperoleh petani, sehingga kesejahteraan petani terbilang masih rendah. Aulia *et al.* (2021) menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Ilustrasi 1.



Ilustrasi 1. Nilai Tukar Petani Nasional

NTP nasional dalam lima tahun terakhir masih mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa NTP dalam skala nasional masih belum stabil. Ketika kondisi $NTP > 100$, maka dapat dikatakan petani mengalami surplus dan lebih sejahtera, apabila $NTP < 100$, artinya petani mengalami defisit dengan kenaikan harga produksinya lebih kecil, sedangkan apabila $NTP = 100$, artinya petani mengalami impas atau *break even* yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode waktu adalah tetap dengan indeks harga yang diterima oleh petani sama dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (BPS, 2021).

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL). Penyuluhan pertanian menjadi bagian dari pembangunan nasional serta sebagai proses transformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian tangguh yang mampu

memanfaatkan sumber daya secara optimal serta mampu melakukan penyesuaian diri dalam pola dan struktur produksinya terhadap perubahan sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan petani dan keluarganya sebagai hasil dari proses belajar mengajar (Sundari *et al.*, 2015). Keberhasilan penyuluh dalam pengembangan usaha agribisnis ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang baik serta saling mendukung dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam usahatani.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan ke petani sayangnya tidak lepas dari beragam permasalahan. Menurut Purukan *et al.* (2021), masalah yang ada pada kegiatan penyuluh pertanian yaitu kurangnya partisipasi petani dan sarana-prasarana penyuluhan yang kurang memadai. Penyediaan PPL yang memadai merupakan langkah pertama dalam upaya menyelesaikan beragam masalah yang ada dan dalam menyediakan layanan penyuluhan yang efektif (Mumtaz & Gopal, 2014). Realitanya, jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal. Tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian yang terbagi menjadi tenaga penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil berjumlah 25.000 orang dan tenaga penyuluh yang bersatus Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) berjumlah 19.000 orang (Vintarno *et al.*, 2019).

Wilayah yang jumlah penyuluhnya masih sedikit salah satunya di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya. PPL yang awalnya membina satu desa, sekarang sudah mencapai tiga sampai empat desa. Titik kegagalan utama dari kegiatan penyuluhan adalah jumlah penyuluh yang

tidak dapat mengunjungi semua petani kecil secara efektif dan tepat waktu (Sennuga *et al.*, 2020). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyuluh jarang mengadakan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama. Hal ini karena kurangnya anggaran biaya untuk kegiatan penyuluhan. Permasalahan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi persepsi petani.

Kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada dasarnya sangat mempengaruhi persepsi petani. Semakin bagus kinerja PPL dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, maka semakin baik pula persepsi petani kepada PPL dan sebaliknya, artinya berhasil atau tidaknya PPL dalam melaksanakan tugasnya dapat dinilai dari manfaat yang diperoleh oleh petani (Permana *et al.*, 2016). Kinerja PPL yaitu berkaitan dengan kemampuan PPL dalam melaksanakan tugasnya dengan melihat beberapa aspek atau indikator kinerja PPL itu sendiri. Zuraidah, (2020) menyebutkan bahwa kinerja seorang PPL dapat dilihat dari sembilan indikator yaitu 1) tersusunnya data potensi wilayah, 2) tersusunnya program penyuluhan, 3) tersusunnya rencana kerja tahunan, 4) majunya informasi teknologi, 5) terwujudnya kelembagaan petani, 6) tumbuh kembangnya kapasitas petani, 7) terwujudnya akses pemasaran, fasilitas, dan pembiayaan, 8) meningkatnya produktivitas dan skala usaha, 9) meningkatnya pendapatan. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui persepsi petani kepada kinerja PPL.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian yaitu faktor internal meliputi usia petani, tingkat pendidikan petani, luas lahan, dan lama berusahatani, dan faktor eksternal yaitu

tingkat keaktifan petani (Krisnawati *et al.*, 2013). Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, alasannya karena petani di Kecamatan Taman merupakan petani yang aktif dan sering terlibat dalam kegiatan penyuluhan.

Harapan dari penelitian ini yaitu agar dapat mempererat hubungan antara penyuluh dan petani, menciptakan kinerja penyuluh yang lebih bagus, serta menumbuhkan persepsi petani yang baik terhadap penyuluh pertanian. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa petani tidak terlalu mengikuti kegiatan penyuluhan, hanya saja ketika ada masalah pupuk bersubsidi. Petani lebih memilih dengan pengalamannya sendiri untuk berusahatani. Penelitian tentang persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian tentunya sudah banyak dilakukan, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode analisis data dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yaitu terkait persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Taman dan faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah penyuluhan.
2. Manfaat bagi petani yaitu sebagai bahan informasi, sehingga diharapkan dapat membangun persepsi yang baik terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
3. Manfaat bagi penyuluh yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait penyuluhan pertanian serta sebagai bahan evaluasi untuk penyuluh mengenai kinerja yang telah didapatkan.
4. Manfaat umum yaitu sebagai bahan referensi bagi pembaca dan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.